

B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tidak Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket			
1	Tenaga Kerja	1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1 RTKD	1 RTKD	ada			
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99,13%		ada			
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	2 Perusahaan		ada			
			4	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	2 Kota		ada			
		2	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/Okupasi		Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/Okupasi	7120	x 100 %	100%	ada
				Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020		7120				
			2	Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi		Jumlah instruktur bersertifikasi kompetensi pada tahun 2021	95	x 100 %	67.85%	ada
				Jumlah instruktur pada tahun 2021		140				
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap jumlah peserta pelatihan		Jumlah instruktur pada tahun 2021	140	x 100 %	1.96%	ada
				Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021		7120				
			4	Persentase penganggur yang dilatih		Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021	7120	x 100 %	3.95%	ada
				Jumlah penganggur pada tahun 2021		179,950				
			5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2021	7120	x 100 %	100%	ada
				Jumlah peserta pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2021		7120				
			6	Persentase penyerapan lulusan		Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2021	2944	x 100 %	41.35%	ada
				Jumlah lulusan pada tahun 2021		7120				
			7	Persentase LPK yang terakreditasi		Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020	111	x 100 %	73.03%	ada
				Jumlah LPK pada tahun 2021		152				
			8	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI) yang diberikan pelatihan		Jumlah CPMI yang dilatih	0	x 100 %	0	
				Jumlah CPMI yang terdaftar		187				
		9	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI)			0		0		
		3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020	5	x 100 %	0.09%	ada
				Jumlah perusahaan pada tahun 2021		5.422				
			2	Persentase lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas		Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun 2021	1	x 100 %	16.66%	sk
		Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun 2021		6						

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
		3	Data tingkat produktivitas total	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	169,460,000,000		
				Jumlah tenaga kerja	2,581,520	0	
		4	1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun 2021	466	8.59%	ada
				Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih pada tahun 2021	5.422 x 100 %		
		2	2 Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2021	64	27.35%	ada
				Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja	234 x 100 %		
		3	3 Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020	Jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2021	9574	9574	
		4	4 Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	74	13.96%	ada
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP dan PKB)	530 x 100 %		
		5	5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	8,279	99.75%	ada
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	8300 x 100 %		
		6	6 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Jumlah perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	138	2.55%	ada
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	5422 x 100 %		
		7	7 Persentase perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	310	5.72%	ada
				Jumlah perusahaan pada tahun 2021	5422 x 100 %		
		8	8 Jumlah mogok kerja		108 orang		ada
		9	9 Jumlah penutupan perusahaan		0		ada
		10	10 Jumlah perselisihan kepentingan		27		ada
		11	11 Jumlah perselisihan hak		79 Perusahaan		ada
		12	12 Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		1		ada
		13	13 Jumlah perselisihan PHK		203 Kasus		ada
		14	14 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		210		ada
		15	15 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		8		ada
		16	16 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		10		ada
		17	17 Upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		2.512.532,-		ada
		18	18 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	64	16.33%	ada
				Jumlah Kasus perselisihan	392 x 100 %		

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
		5	1	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh Dinas Provinsi	3 rekomendasi		ada
			2	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0 Surat Persetujuan		ada
			3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	2.980 Orang		ada
			4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	2.980 Orang		ada
			5	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	9		ada
			6	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	12	0	ada
			7	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	18 orang		ada
			8	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	0 lembaga		ada
			9	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)			ada
			10	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi keulangannya	33 Orang		ada
			11	Jumlah izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) yang diterbitkan	14 izin penempatan		ada
			12	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	2 pos pelayanan		ada
		6	1	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	434 Perusahaan		ada
			2	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	491 Perusahaan		ada
			3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	481 Perusahaan		ada
			4	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jaminan Sosial	502 Perusahaan		ada
			5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	499 Perusahaan		ada
			6	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja	443 Perusahaan		ada



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket		
C. Urusan Pemerintahan Pilihan									
No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket		
8	Transmigrasi	1	1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Jumlah kawasan transmigrasi yang diurus penetapan SK Menteri Desa PDT dan Transmigrasi	0	x 100 %	0	`SK Kemendes PDT dan Trans	Kab. Lima Puluh Kota Dokumen belum dibuatkan disebabkan anggaran tidak tersedia
				Target kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapan SK Menteri Desa PDT dan Transmigrasi	1				
			2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah Satuan Permukiman yang dibangun	0	x 100 %	0	`SK Kemendes PDT dan Trans	Padang Tarok SP.1 Kab. Sijunjung (Pemenuhan Daya Tampung)
				Target Satuan Permukiman yang dibangun	1				
			3 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	1	x 100 %	100%	`SK Kemendes PDT dan Trans	Padang Tarok SP.1 Kab. Sijunjung
				Target Satuan Permukiman yang dibina	1				

Padang, Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS

YULITRI SUSANTI, S.Pi  
NIP. 19740722 199903 2 003

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan		Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
7	Tenaga Kerja	28	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	19	x 100 %	100%	Dinas Nakertrans	ada
				Jumlah Kabupaten/Kota	19				
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	11,440	x 100 %	0.44%	Dinas Nakertrans	ada
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	2,581,520				
		30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	169,460,000,000		6.564,3	Dinas Nakertrans	ada
				Jumlah tenaga kerja	2,581,520				
		31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10,395	x 100 %	125.24%	Dinas Nakertrans	ada
				Jumlah Perusahaan	8,300				
		32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	4,091	x 100 %	20.10%	Dinas Nakertrans	ada
				Jumlah pencaker yang terdaftar	20,357				
		33	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan perundangan bidang ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2020	212	x 100 %	5.57%	Dinas Nakertrans	ada
				Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2020	3,809				

Padang, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS

YULITRI SUSANTI, S.Pi  
NIP. 19740722 199903 2 003